

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki sumber daya alam dan potensi alam yang melimpah. Potensi sumber daya alam tersebut berupa laut, hutan, minyak bumi, batu bara dan gas alam. Sumber daya alam memiliki peranan penting bagi kehidupan makhluk hidup. Oleh karena itu, sumber daya alam perlu dikelola dengan baik, arif dan bijaksana agar dapat digunakan secara berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berwawasan lingkungan agar tetap terjaga kelestariannya. Pada masa saat ini, daya dukung sumber daya di daratan dari waktu ke waktu semakin berkurang sementara jumlah penduduk dan pendapatan masyarakat semakin meningkat (Saprudin & Halidah, 2012).

Eksistensi sumber daya alam di suatu wilayah bergantung pada cara pemanfaatan dan pengelolaan yang dilakukan masyarakat tersebut. Berbagai macam pilihan sumber daya alam menjadi bagian penting dalam mempengaruhi arah pemanfaatan. Arah pemanfaatan tersebut memiliki arti bahwa pemanfaatan terhadap suatu jenis sumber daya akan cenderung bergeser dari wilayah yang mulai menipis sumber dayanya hingga beralih ke wilayah yang memiliki potensi sumber daya yang tinggi. Tingginya aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam memberikan perhatian dari berbagai pihak terutama untuk keberlanjutan sumber daya yang dikelola disertai peningkatan ekonomi masyarakat (Hidayat, 2011).

Indonesia disebut sebagai pemilik hutan mangrove terluas di dunia dengan mencapai presentase 23% ekosistem mangrove dunia. Hutan mangrove di Indonesia memiliki luas sebesar 4,5 juta hektar. Hutan mangrove merupakan kumpulan ekosistem mangrove yang hidup di daerah perairan payau serta terletak diantara daratan dan lautan. Secara ekologis mangrove berperan penting bagi sistem wilayah pesisir. Salah satu wilayah yang memiliki tumbuhan mangrove terbanyak di Jawa Timur yaitu Pulau Madura. Pulau Madura memiliki hutan mangrove seluas 15.118,2 hektar. Hutan mangrove tersebut tersebar di Kabupaten Bangkalan 1.508,1 hektar (10%), Kabupaten Sampang 915,3 hektar (6,1%), Kabupaten Pamekasan 599,3 hektar (4%), dan Kabupaten Sumenep dengan daerah kepulauannya mencapai 12.095,4 hektar (80%) (Muhsoni, 2014).

Sumber daya pesisir hutan mangrove menyediakan berbagai produk dan layanan jasa lingkungan yang menunjang berbagai kebutuhan hidup serta aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi yang dilakukan berupa nelayan, pencari kayu bakar, ekowisata, dan lainnya. Potensi hutan mangrove dapat memberikan harapan kecukupan kebutuhan ekonomi hidup masyarakat terutama yang bermukim di sekitar kawasan hutan mangrove. Hal tersebut menunjukkan bahwa dibutuhkan perlindungan dan pelestarian sistem alami hutan mangrove. Kelestarian fungsi hutan mangrove yang menempati kawasan pesisir menjadi sangat penting dalam kegiatan pembangunan dan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan (Hidayat, 2011).

Valuasi ekonomi merupakan suatu upaya untuk memberikan nilai kuantitatif terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam. Nilai *Total Economic Value* (TEV) ekosistem mangrove dapat digolongkan menjadi dua yaitu nilai guna (*use value*) dan nilai non guna (*non use value*). Nilai guna (*use value*) dibagi lagi menjadi nilai guna langsung (*direct use*), nilai guna tidak langsung (*indirect use*) dan nilai pilihan (*option value*). Nilai guna langsung merupakan nilai yang dihasilkan dari pemanfaatan secara langsung misalnya hasil tangkapan kepiting selama setahun, sedangkan nilai guna tidak langsung yaitu nilai yang diperoleh dari mengasumsikan manfaat secara tidak langsung misalnya pada biaya pembuatan penahan abrasi. Pada nilai non guna (*non use value*) dibagi menjadi dua yaitu nilai keberadaan (*existence value*) dan nilai warisan (*bequest value*) (Wahyuni *et al.*, 2014).

Dengan demikian berdasarkan uraian pernyataan diatas diperlukan valuasi melalui metodologi valuasi ekonomi terhadap potensi ekosistem mangrove. Penelitian ini sangat penting dilakukan sehingga hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan informasi dalam memanfaatkan serta mengelola ekosistem mangrove secara keberlanjutan. Masyarakat di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang banyak yang memanfaatkan habitat hutan mangrove sebagai mata pencaharian mereka seperti nelayan, petambak, pencari kayu bakar dan lainnya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas diperoleh rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Berapa besar nilai INP (Indeks Nilai Penting) mangrove yang terdapat di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang?
2. Berapa besar kuantitatif nilai guna langsung dan nilai guna tidak langsung ekosistem hutan mangrove di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang?
3. Berapa besar nilai kuantitatif total ekosistem hutan mangrove di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang?

1.3. Batasan Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan “Pemanfaatan dan nilai kuantitatif ekosistem sumber daya hutan mangrove di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang”. Nilai kuantitatif dari penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan informasi dalam memanfaatkan serta mengelola ekosistem mangrove secara keberlanjutan.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui perhitungan Indeks Nilai Penting mangrove di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.
2. Mengetahui besar kuantitatif nilai guna langsung dan nilai guna tidak langsung ekosistem hutan mangrove di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.
3. Mengetahui besar nilai kuantitatif total ekosistem hutan mangrove di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh berdasarkan tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat dapat menjadi sumber informasi mengenai kondisi hutan mangrove yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

2. Bagi Pemerintah dapat menjadi masukan dan bahan informasi dalam memanfaatkan serta mengelola ekosistem mangrove secara keberlanjutan.
3. Bagi penulis dapat digunakan sebagai sarana penambahan ilmu dan sebagai masukan untuk menemukan sistem pengelolaan dan pemanfaatan hutan mangrove.